

LAPORAN PENELITIAN DOSEN



IDENTIFIKASI PUSAT PERTUMBUHAN  
DAN DAERAH HINTERLAND  
KOTA PALEMBANG

OLEH:

IMELDA, SE, M.S.E.

NURJAYANTI  
SUHASTY EKA OCHTADILA

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

OKTOBER 2013

## HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Identifikasi Pusat Pertumbuhan Daerah  
Hinterland Kota Palembang

b. Bidang Ilmu : Ekonomi

c. Kajian Utama : Ekonomi Regional

---

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Imelda, SE, M.S.E.

b. Jenis kelamin : Perempuan

c. Golongan Pangkat/NIP : III/b, 197703092009122002

d. Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar

e. Jurusan : Ekonomi Pembangunan

---

3. Anggota Tim Peneliti

3.1. a. Mahasiswa S1 : Nurjayanti

b. NIM : 01101402029

3.2. a. Mahasiswa S1 : Suhasty Eka Ochtadila

b. NIM : 01101402007

---

4. Lokasi Penelitian : Palembang, Sumatera Selatan Indonesia

---

5. Lama Penelitian : 4 (Empat) bulan

---

Inderalaya, 25 Oktober 2013

Ketua Jurusan  
Ekonomi Pembangunan

Ketua Peneliti

Dr. Azwardi, Msi  
Nip.196805181993031003

Imelda, SE, M.S.E.  
Nip. 197703092009122002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Taufiq, SE, M.Si  
Nip. 196812241993031002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin menggeliatnya pertumbuhan ekonomi Kota Palembang merupakan upaya pemerintah kota untuk terus menerus meningkatkan kemajuan daerahnya menjadi kota metropolis dan menginternasional. Hal ini berkaitan dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan. Hasil pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat dinikmati masyarakat sampai di lapisan paling bawah, baik dengan sendirinya maupun dengan campur tangan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan secara beriringan dan terencana, mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan dengan lebih merata.

Pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu alternatif untuk menggerakkan pembangunan. Dengan adanya pusat pertumbuhan ekonomi maka pembangunan akan diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki potensi dan fasilitas wilayah sehingga akan mempercepat terjadinya kemajuan ekonomi, karena secara tidak langsung kemajuan daerah akan membuat masyarakat untuk mencari kehidupan yang lebih layak di daerahnya. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, pembangunan juga harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang secara alami dapat meningkatkan daya tarik investasi.

Menurut Tarigan (2005), pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan dengan dua cara yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar. Apabila dilihat secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang memiliki banyak

fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di situ dan masyarakat senang datang memanfaatkan fasilitas yang ada di lokasi tersebut. Kriteria pusat pertumbuhan yaitu sebagai daerah cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan dan memiliki interaksi ekonomi dengan daerah belakangnya.

Munculnya pusat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa sektor yang dinamis dan mampu memberikan output rasio yang tinggi dan pada wilayah tersebut, yang dapat memberikan dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multiple effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Dalam pendistribusian secara spasial ekonomi, kekuatan pasar akan dijamin keseimbangannya. Selain itu, proses *trickle down effect* atau *centre down* dengan sendirinya akan terjadi ketika kesejahteraan di perkotaan tercapai dan dimulai dari level yang tinggi seperti kawasan perkotaan ke kawasan yang lebih rendah seperti kawasan *hinterland* dan pedesaan melalui beberapa mekanisme yaitu hirarki perkotaan dan munculnya perusahaan--perusahaan besar. Implementasi dari penciptaan pusat pertumbuhan harus diikuti oleh *trickle down effect* (dampak penetes ke bawah) dan *spread effect* (dampak penyebaran) melalui aktivitas harmonis antara pusat pertumbuhan dengan basis sumberdaya di wilayah pedesaan, sehingga kegiatan pusat pertumbuhan berdampak pada daerah sekitarnya juga akan dapat tumbuh.

Dengan kata lain, adanya pusat pertumbuhan ekonomi berimplikasi terhadap kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat yaitu, bagaimana hasil produksi dari pusat-pusat pertumbuhan tersebut, dapat dipakai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berada di daerah sekitar pusat pertumbuhan (*hinterland*), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah *hinterland* tersebut juga dipakai untuk menunjang kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil di pusat pertumbuhan tersebut menjadi generator untuk mendukung kegiatan ekonomi daerah sekitar.

Palembang sebagai ibukota Sumatera Selatan menjadi pusat pertumbuhan daerah merupakan salah satu kota metropolis di Indonesia memiliki luas wilayah

400,61 km<sup>2</sup>. Tahun 2012 jumlah penduduk Palembang sebanyak 1.708.413 orang yang tersebar di 16 kecamatan dan 107 kelurahan.

Laju pertumbuhan ekonomi Palembang pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2010-2012 menunjukkan peningkatan, masing-masing sebesar 6 %, 7% dan menjadi 10 % pada tahun 2012. Dilihat dari distribusi secara sektoral Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang atas dasar harga konstan tahun 2000 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan selama tiga tahun terakhir menjadi *leading sector*, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi (Tabel 1.1)

**Tabel 1.1 Distribusi PDRB Sektoral Kota Palembang  
Berdasar Harga Konstan, 2010-2012**

Sektor	2010	2011	2012
Pertanian	0,73	0,70	0,66
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	36,63	35,89	34,62
Listrik, Gas dan Air Bersih	1,39	1,39	1,37
Bangunan	7,89	8,00	8,63
Perdagangan, Hotel dan Restoran	19,89	19,90	19,55
Pengangkutan dan Komunikasi	14,60	15,24	15,92
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6,85	6,93	7,34
Jasa-jasa lainnya	12,01	11,95	11,91
<b>Laju Pertumbuhan</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>10,00</b>

Sumber Data: <http://palembangkota.bps.go.id/> BPS Kota Palembang

Secara geografis, di sebelah utara, timur dan barat Palembang berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir. Kota Palembang sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan letaknya memiliki lokasi yang strategis secara internasional. Jarak tempuh Palembang dengan Singapura sebagai salah satu pusat bisnis dunia sama dengan jarak tempuh Palembang menuju Jakarta, ibukota Negara. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan diharapkan Palembang dapat memberikan *spread effect* bagi daerah belakangnya (*hinterland*) di Sumatera Selatan terutama bagi daerah yang berbatasan langsung dengan Palembang yang dikenal dengan istilah **Patung Sang Jaya**, yaitu akronim dari Palembang, Betung, Sungsang, Jejawi, dan Indralaya.

Dengan peranan strategisnya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian regional kawasan barat Indonesia maka menarik untuk mengkaji dan menganalisis interaksi ekonomi Kota Palembang sebagai pusat pertumbuhan dengan mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan tersebut dan kecamatan-kecamatan hinterlandnya.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan membahas tentang kecamatan manakah yang menjadi pusat-pusat pertumbuhan dan *hinterland* di Palembang ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengidentifikasi kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan dan *hinterland* di Palembang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang identifikasi pusat pertumbuhan dan *hinterland* serta menjadi sumbangan pikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijaksanaan perencanaan pembangunan kota Palembang.

## **BAB II**

### **STUDI PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Konsep Wilayah dan Pusat Pertumbuhan**

Secara konsepsi wilayah didefinisikan sebagai ruang yang memiliki kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Undang – Undang nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang). Demikian pula defenisi wilayah menurut Rustiadi, et al. (2006), bahwa wilayah merupakan unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Berdasarkan batasan tersebut, maka wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti, tetapi seringkali bersifat dinamis. Karakteristik wilayah mencakup komponen: biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian, pemahaman terhadap wilayah pada hakekatnya merupakan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Ada beberapa cara untuk menetapkan suatu perwilayahan. Menurut Tarigan (2005), suatu perwilayahan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembentukan wilayah itu sendiri. Dasar perwilayahan dibedakan menjadi :

1. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan. Di Indonesia dikenal wilayah kekuasaan pemerintahan, seperti propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan dusun/lingkungan.
2. Berdasarkan kesamaan kondisi (*homogeneity*). Contoh yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik.
3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. Ditetapkan terlebih dahulu beberapa pusat pertumbuhan (*growth centre*) yang sama besar/rankingnya, kemudian ditetapkan batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan.

Perkembangan modern konsep atau pusat pertumbuhan (*growth point concept*) terutama berasal dari teori kutub pertumbuhan. Adapun dasar pemikiran teori ini adalah kegiatan ekonomi di dalam suatu daerah cenderung terpusat pada satu titik lokal (pusat). Kegiatan ekonomi tersebut akan semakin berkurang pengaruhnya jika semakin menjauh dari pusat pertumbuhan tersebut. Akhirnya, pusat tersebut dapat dikatakan sebagai titik pertumbuhan sedangkan daerah sekitarnya yang masih terpengaruh adalah daerah pengaruhnya.

Menurut Sihotang (2001), semakin kuat ciri-ciri nodal dari daerah yang bersangkutan, akan semakin tinggi tingkat pertumbuhannya dan perkembangan ekonomi sosialnya. Dengan demikian, kebijakan regional yang diterapkan akan berhasil jika kebijakan tersebut mendukung ciri-ciri nodal alami yang sudah terbentuk pada daerah tersebut.

Selain itu, pusat-pusat penduduk yang besar mempunyai potensi pasar yang tinggi dan secara kultural dan sosial lebih menarik untuk dikembangkan. Dengan demikian, titik pertumbuhan biasanya terjadi secara alami dan kemudian dikembangkan sehingga peningkatan ekonomi pada pusat pertumbuhan tersebut amat tergantung dari penggunaan sumber daya yang digunakan pada titik dan daerah pengaruhnya.

### **2.1.2 Teori Kutub Pertumbuhan**

Teori kutub pertumbuhan yang diperkenalkan oleh ekonom Perancis Francis Perroux dalam Arsyad (1999) dengan teorinya *pole croisanse* atau *pole de development* dimana telah mendefinisikan kutub pertumbuhan regional sebagai seperangkat industri-industri sedang mengalami perkembangan, dan berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan lanjut dari kegiatan ekonomi melalui daerah pengaruhnya. Pemikiran dasar dari teori ini adalah kegiatan ekonomi di dalam suatu daerah cenderung terpusat pada satu titik lokal (pusat).

Menurut Arsyad (1999) inti teori yang dikemukakan oleh Perroux tersebut adalah :

- a. Dalam proses pembangunan akan muncul industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Sehingga,



pengembangan terhadap industri unggulan akan mempengaruhi industri lainnya yang berhubungan erat dengan industri unggulan tersebut.

- b. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Konsep titik pertumbuhan (*growth point concept*) adalah merupakan mata rantai antara struktur daerah-daerah nodal yang berkembang dengan sendirinya dan perencanaan fisik dan regional. Sebagaimana telah diketahui, keuntungan-keuntungan aglomerasi menyebabkan konsentrasi produksi lebih efisien dari pada yang terpecah-pecah, sedangkan keseimbangan antara keuntungan-keuntungan skala dalam penyediaan pelayanan-pelayanan sentral dan keinginan akan kemudahan hubungan telah mengakibatkan konsentrasi penduduk yang tersusun dalam suatu hirarki difokuskannya pusat-pusat sub-regional bagi pertumbuhan telah membantu menjembatani celah antara teori lokasi dan teori ekonomi regional. Selain itu juga memasukkan unsur kesatuan dan pengarahannya ke dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan regional seperti: pembuatan prasarana pada titik-titik pertumbuhan, lokasi perumahan baru, dan penggairahan migrasi intra-regional dan perjalanan ke tempat kerja ke pusat-pusat yang direncanakan.

Pemikiran dasar dari titik pertumbuhan adalah bahwa kegiatan ekonomi di dalam suatu wilayah cenderung beraglomerasi di sekitar sejumlah titik-titik tokal. Di dalam suatu wilayah, arus polarisasi akan bergravitasi ke arah titik-titik tokal ini, walaupun kepadatan dari arus tersebut akan berkurang karena jarak. Di sekitar titik tokal (pusat dominan) kita dapat menentukan garis perbatasan dimana kepadatan arus turun sampai suatu tingkat kritis minimum, pusat tersebut dapat dinamakan sebagai titik pertumbuhan, sedangkan wilayah di dalam garis perbatasan merupakan wilayah pengaruhnya (wilayah pertumbuhan).

Berdasarkan penafsiran di atas, distribusi penduduk secara spasial tersusun dalam sistem pusat hirarki dan kaitan-kaitan fungsional. Semakin kuat ciri-ciri nodal dari wilayah-wilayah yang bersangkutan semakin tinggi tingkat pertumbuhannya dan demikian juga halnya dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosialnya. Dengan demikian rencana pengembangan wilayah akan lebih berhasil jika rencana tersebut diarahkan untuk memperkuat ciri-ciri titik pertumbuhan alamiah yang terdapat di masing-masing wilayah. Strategi titik pertumbuhan

dapat ditafsirkan sebagai upaya mengkombinasikan ciri-ciri tempat sentral yang mempunyai orde tinggi dan lokasi potensial yang akan memberikan keuntungan-keuntungan aglomerasi.

Jadi jelaslah konsep titik pertumbuhan itu merupakan mata rantai penghubung antara struktur wilayah-wilayah nodal yang berkembang dengan sendirinya dengan perencanaan fisik dan wilayah.

### **2.1.3 Teori Tempat Sentral**

Menurut teori ini bahwa fungsi pokok suatu pusat kota adalah sebagai pusat pelayanan bagi daerah-daerah belakangnya yang mengemban fungsi sosial-ekonomi bertindak untuk melayani daerah hinterlandnya (desa atau kota lainnya yang mempunyai pengaruh hubungan yang kuat). Kota yang mampu melayani masyarakat kota sering disebut fungsi kota, yang selalu dikaitkan dengan sosial ekonomi utama suatu kota. Fungsi kota dicerminkan oleh kelengkapan dan kualitas fasilitas pelayanan perkotaan yang dimilikinya, disamping itu kota ditinjau dari segi aksesibilitasnya ke kota-kota lain atau wilayah belakangnya. Pola ideal yang diharapkan terbentuk, asumsi homogen dalam hal bentuk medan, kualitas tanah dan tingkat ekonomi penduduk serta budayanya, Christaller menyajikan bentuk pola pelayanan seperti jejaring segi enam (hexagonal). Bentuk pola pelayanan hexagonal ini secara teoritis mampu memperoleh optimasi dalam hal efisiensi transportasi, pemasaran dan administrasi (Haggett, 2001).

Kota sebagai pusat pelayanan juga, diharapkan memiliki fasilitas pelayanan seperti; (1) pusat dan pertokoan sebagai fokus point dari suatu kota, (2) sarana dan prasarana transportasi, (3) tempat rekreasi dan olah raga, dan (4) sarana pendidikan, kesehatan dan obyek wisata. Dengan demikian kota menyediakan segala fasilitas bagi kehidupan baik sosial maupun ekonomi, sehingga baik tempat tinggal maupun bekerja dan berkreasi dapat dilakukan dalam kota (Jayadinata, 1992).

Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan penduduk. Semakin lengkap penyediaan fasilitas-fasilitas di suatu tempat berarti semakin kuat daya tarik mengundang penduduk dan kegiatan-

kegiatan produktif untuk datang ke tempat tersebut. Dalam meningkatkan pembangunan wilayah harus diupayakan untuk memanfaatkan peran kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan. Ada dua faktor penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan peran pusat-pusat dan hirarki dari masing-masing pusat. Pusat-pusat pelayanan yang lebih kecil adalah penghubung antara pusat-pusat pelayanan yang lebih besar dengan daerah pedesaan.

#### **2.1.4 TEORI PUSAT PINGGIRAN**

##### **A. Myrdal, Hirschman**

Hirschman adalah seorang penganjur teori pertumbuhan tidak seimbang. Secara geografis, pertumbuhan ekonomi pasti tidak seimbang. Dalam proses pertumbuhan tidak seimbang selalu dapat dilihat bahwa kemajuan disuatu tempat (titik) menimbulkan tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan, dan dorongan-dorongan kearah perkembangan pada tempat-tempat (titik-titik) berikutnya. Hirschman (1958), menyadari bahwa fungsi-fungsi ekonomi berbeda tingkat intensitasnya pada tempat yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi diutamakan pada titik originalnya sebelum disebarkan ke berbagai tempat lainnya. Ia menggunakan istilah Titik Pertumbuhan (*Growing Point*) atau Pusat Pertumbuhan (*Growing Centre*).

Di suatu negara terdapat beberapa titik pertumbuhan, dimana industri berkelompok di tempat itu, karena diperoleh beberapa manfaat dalam bentuk penghematan-penghematan dan kemudahan-kemudahan. Kesempatan investasi, lapangan kerja dan upah buruh relatif tinggi lebih banyak terdapat di pusat-pusat pertumbuhan dari pada daerah belakang. Antara pusat dan daerah belakang terdapat ketergantungan dalam suplai barang dan tenaga kerja. Pengaruh yang paling hebat adalah migrasi penduduk ke kota-kota besar (urbanisasi) akan dapat mengabsorbsikan tenaga kerja yang trampil dan pihak lain akan mengurangi pengangguran tidak kentara di daerah belakang. Hal ini tergantung pada tingkat kplementaritas antara dua tempat tersebut.

Jika kplementaritas kuat akan terjadi proses penyebaran pembangunan ke daerah-daerah belakang (*trikling down*) dan sebaliknya jika kplementaritas lemah akan terjadi pengaruh polarisasi (Keban, 1995). Jika pengaruh polarisasi lebih

kuat dari pengaruh penyebaran pembangunan maka akan timbul *masyarakat dualistik, yaitu selain memiliki ciri-ciri daerah perkotaan modern juga memiliki daerah perdesaan terbelakang* (Hammand, 1985, Indra Catri, 1993). Walaupun terlihat suatu kecenderungan yang suram namun Hirschman optimis dan percaya bahwa pengaruh *trikling-down* akan mengatasi pengaruh polarisasi. Misalnya bila daerah perkotaan berspesialisasi pada industri dan daerah perdesaan berspesialisasi pada produksi primer, maka meluasnya permintaan daerah perkotaan harus mendorong perkembangan daerah perdesaan, tetapi apa yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Pada khususnya ada kemungkinan besar bahwa elastisitas penawaran jangka pendek di daerah perdesaan adalah sedemikian rendah sehingga dasar pertukaran akan berubah merugikan daerah perkotaan. Dalam jangka panjang penghematan-penghematan eksternal dan tersedianya komplementaritas di pusat-pusat akan menjamin penyebaran pembangunan ke daerah-daerah disekitarnya.

Pada pihak lain, berdasarkan konseptual yang serupa mengenai struktur titik-titik pertumbuhan dan daerah-daerah belakang, Myrdal (1957) menggunakan istilah *Backwash effect dan spread effect* yang artinya persis serupa dengan polarisasi dan pengaruh *trikling down*. Namun demikian, dalam penekanan pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan terdapat perbedaan yang cukup besar. Analisa Myrdal memberikan kesan pesimistis, ia berpendapat bahwa *polarisasi muncul lebih kuat dari pada penyebaran pembangunan*, permintaan faktor-faktor produksi akan menumpuk di daerah- daerah perkotaan yang memberikan manfaat kepadanya, dan sebaliknya di daerah perdesaan yang tidak menguntungkan akan menipis.

Pesimisme tersebut dapat dimaklumi karena Myrdal tidak memaklumi bahwa timbulnya titik pertumbuhan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dan merupakan syarat bagi perkembangan selanjutnya dimana-mana. Pusat pemikiran Myrdal pada kausasi kumulatif menyebabkan ia tidak dapat melihat dengan titik balik apabila perkembangan kearah polarisasi di suatu wilayah sudah berlangsung untuk beberapa waktu. Kausasi sirkuler kumulatif selalu menghasilkan penyebaran pembangunan yang lemah dan tidak pemerataan, *atau dapat dikatakan bahwa mobilitas akan memperbesar ketimpangan pendapatan dan migrasi akan memperbesar ketimpangan regional*.

Berdasarkan pada perbedaan pandangan diatas, maka kebijaksanaan perspektif yang dianjurkan oleh Hirschman dan Myrdal berbeda pula. Hirschman menyarankan agar membentuk lebih banyak titik-titik pertumbuhan supaya dapat menciptakan pengaruh-pengaruh penyebaran pembangunan yang efektif, sedangkan Myrdal menekankan pada langkah-langkah kebijaksanaan untuk melemahkan *backwash effects* dan memperkuat *spread effect* agar proses kausasi sirkuler kumulatif mengarah keatas, dengan demikian semakin memperkecil ketimpangan regional (Murtomo, 1988, Indra Catri, 1993, Keban, 1995).

Gunnar Myrdal (1957) dan Aschman (1958) dalam Keban (1995), menyerang pengertian equilibrium dalam teori ekonomi dan mengemukakan ide-ide dasar tentang polarisasi pembangunan. Menurut pandangan Myrdal, daerah-daerah inti dari perekonomian adalah magnet penguat dari kemajuan. Myrdal mengemukakan bahwa setelah pertumbuhan dimulai pada lokasi yang dipilih pada perekonomian bebas, arus masuk tenaga kerja, ketrampilan, modal dan komoditi berkembang secara spontan untuk mendukungnya. Tetapi arus ini meliputi efek backwash, ketidak samaan antara daerah-daerah yang berkembang dengan daerah-daerah lain.

Daerah-daerah yang sedang tumbuh mempengaruhi daerah-daerah lain melalui dua kekuatan yang berlawanan, menurut model Myrdal disebut Efek *Backwash* (*bersifat mendorong ke belakang*) dan efek penyebaran (*Spread effect dan backwash effect*). Efek penyebaran menunjukkan dampak yang menguntungkan dari daerah-daerah yang makmur terhadap daerah-daerah yang kurang makmur, hal ini meliputi: meningkatnya permintaan komoditi primer, investasi dan difusi ide serta teknologi. Dalam banyak negara-negara terbelakang, efek penyebaran terbatas pada daerah-daerah disekitar pusat-pusat hirarki perkotaan (Murtomo, 1988, Keban, 1995).

Hirschman membantah bahwa memilih dan memusatkan aktivitasnya pada titik-titik pertumbuhan adalah alami bagi para pengusaha. Pembangunan lama kelamaan tidak berimbang, pertumbuhan daerah yang sedang berkembang membatasi kapasitas pertumbuhan dimana-mana. Utara (*North*) menarik tenaga trampil dan tabungan dari selatan (*South*). Elastisitas permintaan pendapatan lebih besar untuk barang-barang buatan North, dan oleh karena itu syarat-syarat perdagangan melawan produsen South akan komoditi primernya (Jhingan, M.L. 1993, Arsyad, 1988).

## B. FRIEDMAN

John Friedman, Weaver, (1979) menganalisa aspek tata ruang, lokasi serta persoalan-persoalan kebijaksanaan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih general. Friedman telah menampilkan teori daerah inti. Di sekitar daerah inti terdapat daerah-daerah pinggiran atau *periphery region*. Daerah pinggiran ini sering disebut pula daerah pedalaman atau daerah-daerah sekitarnya.

Pembangunan dipandang sebagai proses inovasi yang diskontinyu tetapi komulatif yang berasal dari sejumlah kecil pusat-pusat perubahan, yang terletak pada titik-titik interaksi yang mempunyai potensi tertinggi. Pembangunan inovatif cenderung menyebar ke bawah dan keluar dari pusat-pusat tersebut ke daerah yang mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah.

Pusat-pusat besar pada umumnya berbentuk kota-kota besar, metropolis atau megapolis, dikategorikan sebagai daerah inti, dan daerah-daerah yang relatif statis sisanya merupakan daerah pinggiran. Wilayah pusat merupakan subsistem dari kemajuan pembangunan yang ditentukan oleh lembaga di daerah inti dalam arti bahwa daerah pinggiran berada dalam suatu hubungan ketergantungan yang sub stansial. Daerah inti dan wilayah pinggiran bersama-sama membentuk sistem spasial yang lengkap (Indra Catri, 1993, Murtomo, 1988).

Dalam pengembangan daerah melalui pusat-pusat pertumbuhan, kegiatan akan disebar ke beberapa pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan hirarki dan fungsinya. Pada skala regional dikenal tiga orde, yaitu:

### 1. Pusat pertumbuhan primer (utama)

Pusat pertumbuhan primer atau pusat utama orde satu ialah pusat utama dari keseluruhan daerah, pusat ini dapat merangsang pusat pertumbuhan lain yang lebih bawah tingkatannya. Biasanya pusat pertumbuhan orde satu ini dihubungkan dengan tempat pemusatan penduduk terbesar, kelengkapan fasilitas dan potensi aksesibilitas terbaik, mempunyai daerah belakang terluas serta lebih multi fungsi dibandingkan dengan pusat-pusat lainnya.

## 2. Pusat pertumbuhan sekunder (kedua)

Pusat pertumbuhan sekunder ini adalah pusat dari sub-daerah, seringkali pusat ini diciptakan untuk mengembangkan sub-daerah yang jauh dari pusat utamanya. Perambatan perkembangan yang tidak terjangkau oleh pusat utamanya dapat dikembangkan oleh pusat pertumbuhan sekunder ini.

## 3. Pusat pertumbuhan tersier (ketiga)

Pusat pertumbuhan tersier ini merupakan titik pertumbuhan bagi daerah pengaruhnya. Fungsi pusat tersier ini ialah menumbuhkan dan memelihara kedinamisan terhadap daerah pengaruh yang dipengaruhi (Friedmann, 1966).

Manfaat konsep pusat-pusat pertumbuhan sebagai alat kebijaksanaan dalam perencanaan regional telah cukup lama disadari. Akan tetapi relevansinya tidak hanya terbatas pada daerah-daerah yang mengalami kemunduran saja, karena pada awal tahun 1964 telah disarankan suatu kebijaksanaan yang mengkonsentrasikan semua pertumbuhan industri dalam sejumlah kecil pusat besar bagi daerah makmur (Glasson, 1977). Kebijakan-kebijaksanaan tersebut juga telah mendapat sambutan yang menyenangkan di negara-negara yang sedang berkembang. Beberapa contoh yang terkenal adalah kompleks industri Bari Toronto-Brindisi untuk daerah Mezzogiorno di Italia Selatan, dan pembangunan pusat-pusat baru di Brasilia dan Cuidad Guyana sebagai usaha untuk menimbulkan pertumbuhan ke dalam daerah-daerah yang terbelakang di Brasilia dan Venezuela.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Sugiyanto dan Sukesu (2010) menyimpulkan terdapat 5 kecamatan yang potensial menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Lamandau sedangkan Erwin Harahap (2009) menyimpulkan besarnya potensi Kecamatan Perbaungan Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Serdang Bedagai. Demikian pula dengan hasil penelitian dari Dita Hestuadiputri (2007) menyimpulkan bahwa Lasem Kecamatan (IKK) Lasem mempunyai jangkauan pelayanan dan wilayah pengaruh secara keruangan bahkan ke wilayah-wilayah hinterlandnya di Kabupaten Rembang.

Sidqi FD (2004) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pusat Pemerintahan yang Optimal di Kabupaten Wonosobo dalam Pengembangan

Wilayah, yang bertujuan menganalisis faktor-faktor yang melandasi penetapan Kecamatan Wonosobo sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Wonosobo, menganalisis dampak penetapan Kecamatan Wonosobo sebagai pusat pemerintahan terhadap masyarakat selama ini, mengetahui alternatif lokasi pusat pertumbuhan dan pelayanan dalam upaya pengembangan wilayah di Wonosobo. Hasil penelitian menyimpulkan Kecamatan Wonosobo merupakan lokasi yang meminimumkan jarak pelayanan.

Irawati (1998) dalam penelitiannya yang berjudul Peranan dan Fungsi Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Pelayanan Dalam Pembangunan Wilayah yang bertujuan menganalisis dasar penetapan dan fungsi sistem perwilayahan pembangunan sebagai kebijaksanaan dan strategi pembangunan wilayah di Kabupaten Bandung, menganalisis sistem hirarki, peran dan fungsi pusat – pusat pertumbuhan dan pelayanan disetiap wilayah pembangunan, menganalisis interaksi dan interdependensi antar pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan.

Penelitian yang membahas tentang peranan ketersediaan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Sibarani (2002) dan Yanuar (2006), menyimpulkan bahwa infrastruktur (jalan, listrik, telepon) memberikan pengaruh yang signifikan dan positif pada agregat output yang diwakili oleh variabel pendapatan per kapita. Kontribusi setiap jenis infrastruktur untuk setiap wilayah berbeda. Bahkan lebih jauh Yanuar menemukan modal fisik (*physical capital*), infrastruktur jalan, telepon, kesehatan dan pendidikan memberikan pengaruh terhadap output dengan wilayah belakangnya dalam sistem tata ruang berdasar jumlah penduduk serta jumlah dan jenis fasilitas pelayanan sosial ekonomi dengan menggunakan metode skalogram, metode skor sentralitas dan metode sosiogram mengemukakan bahwa Kabupaten DT II Bandung telah memanfaatkan konsep pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayahnya, interaksi dan interdependensi antar pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan dengan wilayah belakangnya di Kabupaten DT II telah berjalan dengan baik, kecuali di WP III Bandung.



### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Suatu wilayah maupun Kota atau kabupaten dan Kecamatan akan terus mengalami perubahan-perubahan yang dapat bergerak menuju arah yang positif, tetapi dapat pula bergerak ke arah yang negatif. Kondisi ini kita sebut dengan istilah pertumbuhan wilayah. Namun perkembangan pertumbuhan antar wilayah belum tentu sama. Untuk itu perlu diidentifikasi wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan dan sebagian wilayah lain yang menjadi daerah hinterlandnya. Dengan mengetahui kecenderungan pertumbuhan dari berbagai faktor atas variabel yang berpengaruh, dapatlah ditentukan strategi perencanaan agar dicapai hasil yang baik.

Kerangka pemikiran ini melatarbelakangi oleh fenomena pertumbuhan kota Palembang dari tahun ke tahun, perkembangan fungsi kota Palembang sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, kesehatan serta pendidikan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini adalah identifikasi kecamatan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi serta interaksi kecamatan-kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dengan kecamatan lainnya sebagai pendukungnya (*hinterland*) di Kota Palembang. Periode penelitian adalah kondisi Kota Palembang tahun 2011-2012.

#### **3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang dikumpulkan merupakan data yang telah diolah dan diterbitkan oleh lembaga atau dinas di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh antara lain dari: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan dan Balai Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang.

#### **3.3 Teknik Analisis**

Metode analisis data yaitu deskriptif dengan menyajikan dan menyusun data yang ada ke dalam tabel-tabel sebagai bahan informasi untuk dianalisa dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu dengan mengidentifikasi indikator suatu daerah dikategorikan sebagai pusat kegiatan ekonomi dari adanya keuntungan konsentrasi perkotaan yang meliputi diantaranya fasilitas-fasilitas komersial, perbankan dan finansial, transportasi, komunikasi, adanya fasilitas-fasilitas sosial, hiburan dan keuntungan skala dalam pelayanan umum oleh pemerintah (Sitohang, 2001). Dengan menggunakan analisis *Scalogram* dapat diidentifikasi kecamatan yang dapat dikelompokkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan pada fasilitas perkotaan yang dimiliki.

Mampu tidaknya suatu kecamatan dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan dapat dilihat dari fasilitas perkotaan yang dimilikinya (Blakely, 1999). Analisis Scalogram bertujuan untuk mengidentifikasikan peranan suatu kota berdasarkan pada kemampuan kota tersebut memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin lengkap pelayanan yang diberikan, menunjukkan bahwa kota tersebut mempunyai tingkatan yang tinggi dan dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan.

Stone dalam Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2003).

The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu: 1) infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya). 2) Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi. 3) Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Fasilitas kota selain mampu membentuk struktur fisik kota, juga dibutuhkan sebagai wadah aktivitas baik ekonomi maupun sosial sehari-hari bagi masyarakat setempat (Morris, 2000). Menurut *United Nations* (1979), fasilitas yang harus tersedia diantaranya adalah fasilitas: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, olah raga, keagamaan, rekreasi, kebudayaan, administrasi, keamanan, komersial, keuangan, pertanian, peternakan, industri, transportasi, pos dan telekomunikasi, perumahan, persampahan, drainase, listrik, serta jalan.

Fasilitas harus merinci ruang lingkup pelayanan, jumlah dan kualitas fasilitas untuk masing-masing kelompok umur, kebutuhan ruang, dan lain sebagainya. Pendekatannya dilakukan atas satuan penduduk yang dapat mendukung adanya fasilitas tersebut. Fasilitas yang dibutuhkan dalam suatu kota kecamatan menurut standar DPU meliputi:

**Tabel 3.1**  
**Fasilitas Yang Dibutuhkan Dalam Kecamatan**

No	Jenis Fasilitas		Minimum Penduduk	Radius Pencapaian
1	Pendidikan	SD/MI	1.600 jiwa	1.000 m
		SMP/MTs	4.800 jiwa	-
		SMA/MA	4.800 jiwa	-
2	Kesehatan	Praktek dokter	5.000 jiwa	1.500 m
		Puskesmas pembantu	3 0.000 jiwa	-
		Puskesmas + rawat inap	120.000 jiwa	-
		Rumah sakit bersalin/BKIA	10.000 jiwa	2000 m
		Apotek	10.000 jiwa	-
3	Perekonomian	Pusat perbelanjaan dan niaga (pertokoan, pasar, bank, kantor, industri kecil)	120.000 jiwa	-
4	Pemerintahan dan pelayanan umum	Kantor kecamatan, kantor polisi, kantor pos cabang, kantor telepon, pemadam kebakaran	120.000 jiwa	-
6	Peribadatan *)	Musholla	300 jiwa	-
		Masjid	1.750 jiwa	-
		Masjid Besar	120.000 jiwa	-
		Gereja	1.750 jiwa	-
		Pura	120.000 jiwa	-
		Wihara	120.000 jiwa	-
7	Olah raga dan daerah terbuka	Taman dan lapangan terbuka	120.000 jiwa	-
5	Kebudayaan dan rekreasi	Gedung serba guna	120.000 jiwa	-
8	Transportasi	Terminal	120.000 jiwa	-

\*) *Tergantung dari kondisi setempat (jumlah dan jenis agama yang dianut)*

*Sumber: Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota*

Metode skalogram dilakukan untuk mengetahui pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan jenis unit fasilitas pelayanan yang ada dalam setiap daerah. Asumsi yang dipakai adalah bahwa wilayah yang memiliki ranking tertinggi adalah lokasi yang dapat ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan (Amas Yamin, dkk dalam Pardede, 2008). Dalam analisis skalogram ini subjek diganti dengan pusat permukiman (*settlement*). Sedangkan objek diganti dengan fungsi atau kegiatan. Indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk, jumlah jenis jumlah unit.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode skalogram adalah (Pardede, 2008) :

1. Daerah-daerah di Kecamatan yang ada di Palembang disusun berdasarkan peringkat jumlah penduduk.
2. Daerah-daerah tersebut disusun urutannya berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas yang dimiliki.
3. Fasilitas-fasilitas disusun urutannya berdasarkan jumlah wilayah yang memiliki fasilitas tersebut.
4. Peringkat jenis fasilitas tersebut disusun urutannya berdasarkan jumlah total unit fasilitas.

### **3.4 Batasan Operasional Variabel**

1. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di bawah kabupaten atau kota yang terdiri dari desa-desa atau kelurahan-kelurahan.
2. Pusat pertumbuhan adalah wilayah kecamatan yang menjadi pusat pembangunannya yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga karena sifat perkembangannya tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan kecamatan lain di sekitarnya.
3. Daerah *hinterland* adalah wilayah kecamatan yang berada di sekitar atau di belakang pusat pertumbuhan yang pertumbuhannya dipengaruhi oleh kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan.
4. Fasilitas adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta untuk kepentingan umum, terdiri dari fasilitas sosial, ekonomi dan pemerintahan.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Profil Umum Kota Palembang**

#### **4.1.1 Kondisi Geografis**

Secara geografis Kota Palembang terletak pada posisi antara  $2^{\circ}52'$  sampai  $3^{\circ}5'$  Lintang Selatan dan  $104^{\circ}37'$  sampai  $104^{\circ}52'$  Bujur Timur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1988 luas wilayah Kota Palembang adalah  $400.61 \text{ km}^2$  atau 40.061 Ha.

Secara administrasi Kota Palembang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Banyuasin.
- Sebelah Timur : Kabupaten Banyuasin.
- Sebelah Barat : Kabupaten Banyuasin
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim.

Apabila dilihat secara topografi, Kota Palembang terletak pada posisi belahan Timur Pulau Sumatera yang merupakan dataran rendah dan berawa, serta terdapat perbedaan karakter topografi antara seberang ulu dengan seberang ilir.

Pada bagian wilayah Seberang Ilir adanya variasi topografi (ketinggian) 4 sampai dengan 20 meter di atas permukaan laut dan lembah–lembah yang kontinyu serta tidak terdapat topografi yang terjal. Sampai dengan jarak 5 km ke arah Utara Sungai Musi kondisi topografi relatif menaik dan setelah itu semakin ke Utara menurun kembali. Sebaliknya, Seberang Ulu umumnya mempunyai topografi yang relatif datar dan sebagian besar dengan tanah asli berada di bawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi (+ 3,5 M sampai 4,12 M di atas permukaan laut) kecuali lahan yang telah di bangun dan akan dibangun, dimana permukaan tanah telah mengalami penimbunan (reklamasi). Dengan demikian, aspek topografi pada prinsipnya tidak ada faktor pembatas untuk pengembangan ruang, baik berupa kelerengan atau kemiringan yang besar.

#### 4.1.2 Kondisi Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Palembang pada Januari 2013 sebanyak 1.703.740 yang terdiri dari 868.197 laki-laki dan 840.216 perempuan, sedangkan jumlah penduduk pertengahan tahun 2010 berdasarkan hasil SP2010 dari Badan Statistik berjumlah 1.455.284 dengan laju pertumbuhan penduduk berdasarkan SP 2010 terhadap jumlah penduduk tahun 2012 sebesar 1.70%.

Penyebaran penduduk Kota Palembang tidak merata. Konsentrasi penduduk masih bertumpu di Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Sukarami. Rincian jumlah penduduk Kota Palembang per kecamatan dapat dilihat dari Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1  
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin  
Tahun 2012

No	Kecamatan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Ilir Barat II	37.918	36.761	74.679
2	Seberang Ulu I	94.867	92.183	187.050
3	Seberang Ulu II	53.166	51.202	104.368
4	Ilir Barat I	74.040	72.755	146.795
5	Ilir Timur I	39.387	40.267	79.654
6	Ilir Timur II	98.773	96.087	194.860
7	Sukarami	79.543	76.966	156.509
8	Sako	48.548	46.931	95.479
g	Kemuning	47.415	46.319	93.734
10	Kalidoni	62.596	59.409	122.005
11	Bukit Kecil	25.248	25.243	50.491
12	Gandus	34.600	32.876	67.476
13	Kertapati	50.911	48.666	99.577
14	Plaju	48.880	47.394	96.274
15	Alang-Alang Lebar	48.307	47.091	95.398
16	Sematang Borang	20.087	19.304	39.391
	Total	864.286	839.454	1.703.740

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang

#### **4.2 Profil Sosial Budaya, Kesehatan dan Pemerintahan**

Sarana pendidikan merupakan bidang yang akan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sarana Pendidikan seperti jumlah Sekolah di Kota Palembang baik Negeri maupun Swasta pada tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 1.142 sarana pendidikan yang terdiri dari:

- 1) Sebanyak 294 sekolah taman kanak-kanak
- 2) Sebanyak 358 Sekolah Dasar/Madarasah ibtidaiyah (SD/MI)
- 3) Sebanyak 198 Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs),
- 4) Sebanyak 162 Sekolah Menengah Umum/ Madrasah Aliyah (SMU/MA)
- 5) Sebanyak 63 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
- 6) Sebanyak 62 Perguruan Tinggi/ Universitas.

Dengan besarnya jumlah penduduk maka ketersediaan sarana kesehatan menjadi penting. Jumlah fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Klinik bersalin dan puskesmas keliling pada tahun 2011 masing-masing berjumlah 26 unit, 39 Unit, 70 Unit, 32 unit dan 20 unit dari fasilitas tersebut diharapkan peningkatan kesehatan masyarakat kota Palembang semakin meningkat.

Selain sarana kesehatan juga dibutuhkan fasilitas sosial lainnya. Salah satu fasilitas sosial tersebut adalah panti asuhan. Jumlah panti asuhan yang dikelola swasta dan pemerintah di Kota Palembang sebanyak 7 (tujuh) panti dengan jumlah penghuni sebanyak 431 orang. Rincian masing-masing panti asuhan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.



Tabel 4.2  
Jumlah Panti Asuhan dan Jumlah Penghuni  
Berdasarkan Jenis kelamin Tahun 2012

No	Jenis Panti	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Panti Sosial Bina Anak Remaja (PSBAR)	-	20	20
2	Panti sosial rehabilitasi tresna Werdha Teratai (PTWT)	31	41	72
3	Panti Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan orang telantar	88	68	156
4	Panti Rehabilitasi penderita cacat Netra (PRPCN)	25	20	45
5	Panti rehabilitasi anak-anak Nusantera	19	1	20
Jumlah		163	150	313

Sumber : Dinas Sosial Kota Palembang

Secara administratif Kota Palembang sejak tahun 2007 dibagi menjadi 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan.

1. Kecamatan Ilir Timur I : 11 Kelurahan
2. Kecamatan Kemuning : 6 Kelurahan
3. Kecamatan Ilir Timur II : 12 Kelurahan
4. Kecamatan Kalidoni : 5 Kelurahan
5. Kecamatan Ilir Barat I : 6 Kelurahan
6. Kecamatan Bukit Kecil : 6 Kelurahan
7. Kecamatan Ilir Barat II : 7 Kelurahan
8. Kecamatan Gandus : 5 Kelurahan
9. Kecamatan Seberang Ulu I : 10 Kelurahan
10. Kecamatan Kertapati : 6 Kelurahan
11. Kecamatan Seberang Ulu II : 7 Kelurahan
12. Kecamatan Plaju : 7 Kelurahan
13. Kecamatan Sako : 4 Kelurahan
14. Kecamatan Sukarami : 7 Kelurahan
15. Kecamatan Alang-Alang Lebar : 4 Kelurahan
16. Kecamatan Sematang Borang : 4 Kelurahan

Sebagai implementasi dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Kota Palembang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan dan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Palembang yang terdiri dari Sekretaris Daerah, 4 Asisten, 11 Bagian, Sekretariat DPRD, Inspektur, 17 Dinas, 1 Satuan, 9 badan, 3 BUMD dan 1 kantor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang.

### 4.3 Profil Ekonomi

Dengan semakin membaiknya perekonomian global, maka kondisi perekonomian Kota Palembang di tahun 2012 pada dasarnya juga stabil. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator yang mencerminkan gambaran penciptaan nilai tambah bruto dari berbagai aktivitas ekonomi di Kota Palembang dapat dilihat dari Tabel 4.3.

Tabel 4.3  
Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang  
Tahun 2012 (dalam juta rupiah)

Sektor	ADH Berlaku	ADH Konstan
1. Pertanian	290.729	134.197
2. Pertambangan dan Penggalian	0	0
3. Industri Pengolahan	29.661.198	7.352.747
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	803.952	295.031
5. Bangunan	4.985.935	1.894.580
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	11.223.737	4.149.525
7. Pengangkutan dan Komunikasi	7.398.356	3.537.820
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan	3.996.915	1.517.537
9. Jasa-jasa lainnya	8.574.395	2.542.643
<b>PDRB dengan Migas</b>	<b>66.935.210</b>	<b>21.424.079</b>
<b>PDRB tanpa Migas</b>	<b>51.433.657</b>	<b>19.493.524</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang (angka sangat- sangat sementara Per 11 Maret 2013 belum di publikasikan dan masih akan berubah)

Berdasarkan kontribusi atau peranan masing-masing sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dalam konteks yang lebih jauh akan memperlihatkan bagaimana suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor perekonomian dapat dilihat struktur ekonomi Kota Palembang. Berdasarkan pendekatan produksi, seluruh sektor lapangan usaha yang ada di suatu wilayah biasanya di kelompokkan dalam 9 sektor. Kesembilan sektor tersebut dapat diklasifikasikan kembali dalam tiga sektor utama, yaitu **Sektor Primer, Sekunder, Tersier**.

Sektor **Primer** mencakup kegiatan pertanian, Pertambangan, dan penggalian. **Sektor Sekunder** meliputi kegiatan industri pengolahan, listrik, Gas dan air bersih serta bangunan. **Sektor Tersier** mencakup kegiatan Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa lainnya. Adapun struktur Ekonomi Kota Palembang masih didominasi oleh sektor sekunder. Tabel 4.4 menyajikan struktur ekonomi menurut sektor Primer, Sekunder dan Tersier.

Tabel 4.4  
 Persentase Struktur Ekonomi Kota Palembang  
 Menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier  
 Tahun 2012

Sektor	Persentase
Primer	0.43
Sekunder	52.96
Tersier	46.7
Jumlah	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang  
 (angka sangat-sangat sementara)

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja ekonomi daerah serta dapat menunjukkan arah kebijakan pembangunan suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

Krisis global yang terjadi di tahun 2008 cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Palembang. Pada beberapa sektor ekonomi laju pertumbuhan melambat dari tahun sebelumnya, yang pada akhirnya

mengakibatkan total pertumbuhan ekonomi Kota Palembang lebih kecil. Laju pertumbuhan tertinggi PDRB Kota Palembang Tahun 2012 adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 12.11%.

Tabel 4.5  
Laju Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Sektor Tahun 2009-2012

Sektor	2009	2010	2011	2012*
1. Pertanian	3.12	2.30	2.77	2.86
2. Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Industri Pengolahan	4.02	4.44	5.89	7.17
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	3.53	6.22	8.35	8.57
5. Bangunan	7.12	8.03	18.46	10.73
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.79	6.67	7.84	7.11
7. Pengangkutan dan Komunikasi	11.63	11.23	14.71	12.11
8. Keuangan, Persewaan dan JasaPerusahaan	8.57	7.79	16.34	4.27
9. Jasa-jasa lainnya	6.10	6.10	9.43	7.68
<b>PDRB dengan Migas</b>	<b>5.60</b>	<b>6.60</b>	<b>9.79</b>	<b>8.09</b>
<b>PDRB tanpa Migas</b>	<b>6.42</b>	<b>7.37</b>	<b>10.85</b>	<b>8.92</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang (\*angka sangat-sangat sementara per Maret 2012)

Pendapatan perkapita adalah jumlah seluruh balas jasa faktor produksi yang diterima setiap penduduk secara rata-rata dalam keterlibatannya pada faktor produksi dalam proses produksi sehingga sering digunakan sebagai indikator dalam melihat kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat secara umum. Berdasarkan harga konstan dengan migas, pendapatan per kapita penduduk Kota Palembang di tahun 2012 naik sebesar Rp 606.656,00 atau naik dari Rp 11.051.444,00 tahun 2011 menjadi Rp11.658.100,00 di tahun 2012. Apabila unsur migas dikeluarkan, maka pendapatan per kapita penduduk Kota Palembang naik sebesar Rp 628.155,00 atau naik dari Rp 9.979.416,00 di tahun 2011 menjadi Rp10.607.571 .00 pada tahun 2012. Pendapatan regional perkapita Kota Palembang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6  
Pendapatan Regional Perkapita Kota Palembang Tahun 2007-2012

Tahun	Dengan Harga Berlaku		Dengan Harga Konstan	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
2007	20.230.261	14.109.410	8.813.166	7.710.612
2008 <sup>r</sup>	24.462.150	16.543.143	9.276.634	8.173.198
2009 <sup>r</sup>	25.918.790	18.288.409	9.647.392	8.565.981
2010*	29.520.621	20.794.780	10.168.303	9.093.569
2011**	32.670.008	25.273.653	11.051.444	9.979.416
2012***	36.423.380	27.988.074	11.658.100	10.607.571

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang  
( r. Angka revisi, \*angka sementara, \*\* angka sangat sementara,  
\*\*\*angka sangatsangat sementara, per Maret 2012)

#### 4.4 Pusat Pertumbuhan Kota Palembang

Berdasarkan konsentrasi penduduk dapat dilihat bahwa persebaran penduduk tidak merata dan terpusat di Kecamatan ilir timur II (194860 orang, 11,45 persen), diikuti oleh Kecamatan Seberang Ulu I (187.050 orang, 10,97 persen) dan Sukarami (156.509 orang, 9,2 persen). Tingginya penduduk di tiga Kecamatan ini karena di Kecamatan tersebut merupakan sentra industri dan sentra Pendidikan serta dipengaruhi perbatasan dengan Kabupaten lain atau daerah pinggiran Kota.

Tabel 4.7 menyajikan informasi tentang persebaran UKM di Kota Palembang menurut kecamatan tahun 2012 yang memperlihatkan bahwa letak UKM paling banyak ada di Kecamatan Ilir Timur II dan Sukarami. Jumlah UKM berdasarkan kelompok industri yang terbesar sebarannya di Kecamatan Gandus, Kertapati, Ilir Timur I, Ilir Timur II, Sako dan Sukarami. Dengan kelompok industri terbesar adalah kelompok UKM industri logam, mesin, kimia dan aneka industri (89 unit usaha); dan UKM industri hasil hutan dan perkebunan (10 unit usaha).

Tingginya konsentrasi penduduk tersebut menyebabkan tingginya permintaan ketersediaan fasilitas umum baik sosial, ekonomi dan pemerintahan. Selain itu, jumlah penduduk yang banyak juga menjadi pasar potensial sehingga pasar dan sentra produksi pun akan meletakkan lokasi mendekati konsentrasi penduduk.

Tabel 4.7  
Penyebaran UKM per Kecamatan di Kota Palembang  
Berdasar Kelompok Industri, 2012

N O	KECAMAT AN	INDUSTRI LOGAM, MESIN, KIMIA DAN ANEKA INDUSTRI		INDUSTRI HASIL PERTANIAN DAN PERIKANAN		INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN		INDUSTRI KERAJINAN	
		UNIT USAH A	TENA GA KERJA	UNIT USAH A	TENA GA KERJA	UNIT USAH A	TENA GA KERJA	UNIT USAH A	TENA GA KERJA
		1	Ilir Barat II	1	3	1	36		
2	Gandus Seberang	7	355			4	1017		
3	Ulu I	3	82			2	97		
4	Kertapati Seberang	4	755	2	106	1	20		
5	ulu II	3	166						
6	Plaju	1	30						
7	Ilir Barat I	7	239						
8	Bukit Kecil	5	59					1	95
9	Ilir Timur I	13	760						
10	Kemuning	4	158						
11	Ilir Timur II	8	367	1	463	2	407		
12	Kalidoni	3	94						
13	Sako Sematang	9	969						
14	Borang								
15	Sukarami Alang-alang	17	3614			1	40		
16	Lebar	4	66						
	Jumlah	89	7717	4	605	10	1581	1	95

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan & Koperasi Kota Palembang, 2013

Jika dibagi menurut lokasi wilayah, maka pusat pertumbuhan Kota Palembang adalah Kecamatan Ilir Timur I dan II, Sukarami, Seberang Ulu II, Kalidoni dan Ilir Barat dan II. Hal ini ditunjukkan oleh nilai dari metode Scalogram pada Tabel 4.8. Ketersediaan fasilitas sosial paling banyak di Kecamatan Ilir barat I, untuk fasilitas ekonomi di Ilir Timur I dan pemerintanahn di Ilir Timur II. Namun, dari tabel tersebut terlihat bahwa pusat pertumbuhan di Kota Palembang masih terkonsentrasi (primer) di dua kecamatan saja yaitu Ilir Timur I dan II dibandingkan 16 kecamatan yang ada. Baru kemudian diikuti pusat pertumbuhan kedua (sekunder) oleh Kecamatan Ilir Barat 1 dan II (sebelah barat Palembang), Sukarami (Sebelah Utara Palembang), Kalidoni (Sebelah Timur), dan Seberang Ulu 2 (Sebelah Selatan Palembang) dan Sako (Sebelah Timur Palembang), sedangkan

yang lainnya menjadi daerah *hinterland* di Kota Palembang. Dilihat dari perkembangan dari daerah sekunder, maka Kecamatan Ilir Barat 1 dan II, Sukarami, Kalidoni, dan Seberang Ulu 2 akan dapat menjadi daerah primer berikutnya.

Tabel 4.8  
Nilai Fasilitas Metode Scalogram

Kecamatan	Sosial	Ekonomi	Pemerintahan	Jumlah	Rerata
Ilir Barat II	1522	457	257	2236	1118
Gandus	1049	129	225	1403	701,5
Seberang Ulu I	1003	220	267	1490	795
Kertapati	922	184	256	1362	681
Seberang Ulu II	1086	156	287	1529	764,5
Plaju	919	121	257	1297	648,5
Ilir Barat I	1719	606	287	2612	1306
Bukit Kecil	1039	241	236	1516	758
Ilir Timur I	1341	1024	341	2706	1353
Kemuning	765	364	256	1385	692,5
Ilir Timur II	1362	789	362	2513	1256,5
Kalidoni	687	263	245	1195	597,5
Sako	473	128	255	856	428
Sematang Borang	309	50	240	599	299,5
Sukarami	1216	636	274	2126	1063
Alang-alang Lebar	530	533	234	1297	648,5

Sumber: Data diolah, 2013

Yang berpotensi menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru pada bagian wilayah utara Palembang Kecamatan Seberang Ulu I dan II (wilayah Jakabaring), sebelah timur Palembang adalah Kalidoni dan Sako, sebelah utara Palembang adalah Sukarami dan Alang-Alang Lebar, serta sebelah Barat Palembang adalah Gandus.

## **BAB V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 SIMPULAN**

Pusat pertumbuhan primer di Kota Palembang adalah Kecamatan Iilir Timur I dan II, Sekunder adalah Kecamatan Iilir Barat 1 dan II (sebelah barat Palembang), Sukarami (Sebelah Utara Palembang), Kalidoni (Sebelah Timur), dan Seberang Ulu 2 (Sebelah Selatan Palembang) dan Sako (Sebelah Timur Palembang) sedangkan kecamatan lainnya adalah hinterland Kota Palembang.

### **5.2 SARAN**

Ketidakmerataan pertumbuhan antar wilayah di kota Palembang dapat dieliminir dengan membangun pusat pertumbuhan baru dengan menjadikan daerah pertumbuhan sekunder sebagai pusat pertumbuhan primer yang baru pada berbagai wilayah.